

E - KLIPING

SEKRETARIAT DPRD KAB. KUTAI KARTANEGARA

DPRD Kukar Sampaikan 7 Buah Raperda Pada Konsinyering Program Bersama Pemkab

DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Konsinyering Program Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) pada tahun 2020 bersama Pemkab Kukar, di Hotel Mercure, Samarinda, Sabtu (31/10/2020).

Ada tujuh Raperda yang disampaikan pada Konsinyering yang dilakukan di Ibu Kota Provinsi ini. Hal ini dianggap sangat penting karena semua Raperda yang disampaikan, berhubungan erat dengan rencana tata ruang wilayah yang memerlukan sinergitas yang kuat bersama Pemerintah Provinsi.

Tujuh Raperda itu ialah, 1. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 9 tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019-2039, 2. Rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi kawasan perkotaan Tenggarong tahun 2019-2039, 3. Rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi kawasan perkotaan Sanga-sanga tahun 2019-2039, 4. Rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi kawasan perkotaan Muara Muntai tahun 2019-2039, 5. rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi kawasan perkotaan Muara Kaman tahun 2019-2039, 6. Perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 17 tahun 2016 tentang retribusi jasa umum, 7. Perda pembentukan BUMD Perparkiran.

Konsinyering ini dilaksanakan berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan dan peraturan menteri Dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang produk hukum daerah yang menjadi dasar pedoman penyusunan program pembentukan produk hukum daerah, kata Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid pada saat mengawali sambutannya sekaligus membuka acara yang turut dihadiri Pj Bupati Kukar, H Charli Anwar, dan Biro Hukum Provinsi Kalimantan Timur.

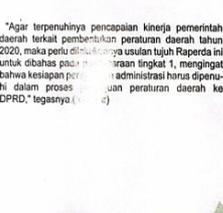
Kegiatan ini juga dihadiri beberapa kepala OPD yang erat kaitannya dengan pembahasan tujuh Raperda ini, yakni Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bagian Hukum Setkab (Sekretariat Kabupaten) Kukar, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setkab Kukar dan Kepala Bagian Ekonomi Setkab Kukar.

Rasid menegaskan, kegiatan ini juga sebagai bagian dari rencana kerja Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) DPRD untuk membahas konsinyering Proemperda tahun 2019-2024.

Konsinyering sebagai pendalaman rencana Raperda yang akan kita susun, kegiatan ini suatu pembekalan tahap awal dalam pembahasan, mudah-mudahan dengan adanya konsinyering seperti ini, ini merupakan suatu penguatan materi yang akan dibahas dan akan menjadi suatu penguat Perda itu sendiri, hari ini banyak pihak kita undang hadir untuk memberikan masukan dan penitilaman materi guna sebagai penguatan Raperda yang ada.







Agar terpenuhinya pencapaian kinerja pemerintah daerah terkait pembentukan peraturan daerah tahun 2020, maka perlu dibicarakan usulan tujuh Raperda ini untuk dibahas pada pembahasan tingkat 1, mengingat bahwa kegiatan pembahasan administrasi harus dipenuhi dalam proses penyusunan peraturan daerah ke DPRD, tegasnya (31/10/2020).

Dipindai dengan CamScanner

Sumber : Media Garda Rakyat



Jdih.dprdkukar



Jdih.dprdkukar



Jdih.dprdkukar

